

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggraini, Jum, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, Jakarta: Penerbit Universitas Tama Jagakarsa, 2011.
- Bawono, Icut Rangga dan Erwin Setyadi, *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2019.
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Arr-ruz Media, 2016.
- Hardiansyah, Haris, *Wawancara, Obervasi, dan Focus Group: Instrumen Penggalian Data kualitatif*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013.
- Jamaludin, Adon Nasrullah, *Sosiologi Perdesaan*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2015.
- Kustiwan, Irwan, *Modul Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota*, Bandung: Penerbit ITB, 2009.
- Maschab, Mashuri, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Yogyakarta: PolGov UGM, 2013.
- Muhaimin, Sutiah, dan Sugeng Listyo prabowo, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ndraha, Taliziduhu, *Dimensi-dimendi Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT. Bina Aksara Jakarta
- Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara Jakarta, 1991.

Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah*, Bandung: Cendekia Press, 2020.

Saragih, Liharman, dkk, *Dasar-Dasar Manajemen*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Soerjono, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian* Jakarta: Rajawali, 2005.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Tutik, Titik Tiwulan, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Wasistiono, Sadu, dan MS. M.Irawan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa Bandung* : CV. Fokus Media, 2007.

Widjaja, HAW, *Otonomi desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT Taja Granfindo Persada, 2003),

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Panduan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2018.

Pasal 1 Angka 4 Permendagri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 46

Profil Desa Pasanggrahan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, 2020.

RPJM Desa Pasanggrahan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Tahun 2020-2025.

Skripsi, Jurnal dan Website:

Assegaf, Syarifah Devi Isnaini, “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2017.

Chandra, Nanda Eka, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Genengan Kecamatan Pakisai Kabupaten Malang),” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015).

Dwisuda, Priokta, “Kedudukan dan Wewenang Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2014.

Erawati, Erni, “Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian Tentang Otonomi Daerah), Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2, No. 2 (Juli 2021) Universitas Diponegoro.

Jamsen, Tri Anggraeni, “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana,” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

Rossae, Anissa, “*Good Governance* dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora”, Skripsi Fakultas ilmu Sosial Universitas negeri Semarang, 2019.

Sudirman, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2012.

Suparman, dkk, “Implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara,” Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN (2014) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Kbbi <http://kbbi.web.id/desa>

Kbbi <https://kbbi.web.id/program>

Narasumber:

Wawancara dengan Bapak Adhari, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pasanggrahan.

Wawancara dengan Ibu Devi Anggara Heriansyah, selaku Sekertaris Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pasanggrahan.

Wawancara dengan Bapak Dayat Permana, selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pasanggrahan.

Wawancara dengan Bapak A. Sulaeman Hudari, selaku Sekertaris Desa Pasanggrahan.

